

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kondisi perekonomian yang menunjukkan peningkatan adalah harapan semua pihak demi terwujudnya kondisi kesejahteraan bagi semua kalangan di seluruh bagian negeri sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Perkembangan ekonomi disuatu negara tidak terlepas dari dukungan dari faktor-faktor ekonomi yang berpengaruh secara signifikan. Pengukuran kondisi perekonomian ini kemudian dapat di ukur dengan beberapa metode, salah satunya adalah dengan melihat pertumbuhan ekonomi (*growth economic*).

Amir dalam Syahrur Romi dan Etik Umiyati menjelaskan bahwa,

**Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.<sup>1</sup>**

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi mampu untuk mengukur kondisi perekonomian. Pemerintah juga telah memberi perhatian khusus terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi ini, pemangku kebijakan saling bersinergi dalam merumuskan arahan dan sasaran serta capaian yang diharapkan terkait pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>1</sup>) Syahrur Romi dan Etik Umiyati, **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kota Jambi**, e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Volume 7, Nomor 1, Januari-April 2018, hal. 1-2.

Melihat hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada Laporan Perekonomian Indonesia 2019 pemerintah merumuskan beberapa kebijakan,

**Hal terpenting yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Empat strategi utama untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan yaitu daya saing ekonomi, kapasitas dan kapabilitas industri, ekonomi digital, dan struktur serta sumber pembiayaan.<sup>2</sup>**

Maka jelas diketahui bahwa peningkatan pertumbuhan yang baik perlu di dukung untuk menguatkan daya saing dan capaian kondisi perekonomian yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya.

Penghitungan pertumbuhan ekonomi akan menggunakan data-data pendapatan yang di proyeksikan dalam data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah, dengan melihat faktor-faktor permintaan agregat.

**Penjumlahan nilai pasar dari permintaan sector rumah tangga untuk barang konsumsi dan jasa (C), pengeluaran sector bisnis dan barang investasi (I), pengeluaran sector pemerintah untuk barang dan jasa (G), dan pengeluaran sector luar negeri untuk ekspor-impor (X-M). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh keempat komponen tersebut.<sup>3</sup>**

Maka oleh karena itu, berdasarkan teori permintaan agregat, pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi seperti konsumsi, angkatan kerja, belanja modal daerah daerah dan indek pembangunan. Konsumsi, sebagai salah satu hal yang mampu mendorong perekonomian adalah peningkatan konsumsi rumah tangga. Jumlah konsumsi merupakan salah satu faktor penting

---

<sup>2</sup>) Badan Pusat Statistik, **Laporan Perekonomian Indonesia 2019**, hal. 22.

<sup>3</sup>) Athaillah, dkk., **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh**, Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 1, Nomor 3, Agustus 2013, hal. 2.

dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan manusia di Indonesia. Secara sederhana dapat diketahui, apabila konsumsi meningkat maka akan menaikkan permintaan atas kebutuhan hidup dari penggunaan barang dan jasa, sehingga dapat memicu arus perekonomian yang baik.

Permintaan atas barang dan jasa yang baik, secara langsung akan mempengaruhi peningkatan dari pertumbuhan ekonomi karena kemampuan dan daya beli masyarakat atas barang dan jasa juga meningkat. Prospek dari pertumbuhan ekonomi akan kuat mempengaruhi konsumsi. Oleh karena itu konsumsi memiliki peranan yang cukup tinggi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat ekonom dari mazhab Neo-Klasik, Solow, yang menjelaskan bahwa,

**Faktor produksi modal dan tenaga kerja adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya produksi output, terjadinya peningkatan produksi akan memberikan dampak terhadap peningkatan konsumsi masyarakat yang sekaligus akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.<sup>4</sup>**

Kemudian variabel ekonomi lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah faktor produksi berupa modal manusia. Pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi merupakan suatu hal yang juga menjadi pendukung dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan nasional berupaya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, dengan mengandalkan salah satu modal utama yaitu sumber daya manusia, berfokus

---

<sup>4</sup>) Nurhuda N., Sri Ulfa Sentosa dan Indris, **Analisis Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat**, Jurnal Kajian Ekonomi Universitas Negeri Padang, Volume II, Nomor 03, Juli 2013, hal. 112.

menggunakan pendekatan-pendekatan aktif menyesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai.

Modal manusia yang bekerja apabila produktif dan memberikan sumbangan terhadap kondisi perekonomian kemudian dapat di katakan sebagai angkatan kerja (*labor force*).Elvis F. Purba, Juliana L. Tobing dan Dame Esther dalam publikasi cetakan buku mengartikan angkatan kerja “adalah tenaga kerja yang bekerja dan yang sedang mencari kerja (yang menunggu panggilan bekerja dan yang sedang menganggur)”.<sup>5</sup>Jika memperhatikan uraian tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa setiap orang yang dapat bekerja dan bergerak secara produktif, maka dapat dianggap sebagai tenaga kerja.

Jumlah tenaga kerja yang tersebar di setiap pelosok negeri, jika terserap dengan baik dan berstatus sebagai pekerja aktif, maka akan meningkatkan produktifitas angkatan kerja itu sendiri, modal manusia sebagai salah satu faktor produksi, apabila dapat dikembangkan dengan baik, untuk kemudian akan menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi agregat.

Selanjutnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dapat di dukung oleh belanja modal daerah dari suatu daerah. Besaran belanja modal daerah yang digunakan daerah, merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mempercepat arus peningkatan permintaan barang dan jasa, sehingga apabila disalurkan pada sektor-sektor ekonomi aktif dan produktif, hal ini kemudian akan meningkatkan persentasi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>5</sup>) Elvis F. Purba, dkk., **Ekonomi Indonesia**, Edisi Kedua, Cetakan Ke-II, (Medan : Universitas HKBP Nommensen, 2014), hal. 57.

Maka, belanja modal daerah dapat dikatakan sebagai salah satu kebijakan pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercermin dari kebijakan pemerintah kepada masyarakat (*government public policy*) apabila rumusan kebijakan tersebut, diarahkan kepada pembangunan ekonomi makro, menengah dan mikro, tentu arus pembelian barang dan jasa untuk pembangunan tersebut jelas akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pemerintahan daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal daerah untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih. Kondisi tersebut dipicu akibat jumlah barang dan jasa yang di distribusikan untuk peningkatan pembangunan ekonomi akan berpengaruh terhadap besaran pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dapat mendukung kesejahteraan rakyat yang mandiri dan liberal.

Belanja modal daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah dalam penggandaan sarana dan prasarana yang baik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat dengan penyediaan pasilitas seperti tanah, bangunan, jalan, irigasi dan lainnya. Imoratus Sholikhah dan Agus Wahyudi menjelaskan bahwa fungsi penggunaan belanja modal daerah yang baik adalah untuk peningkatan sarana publik,

**Untuk mendukung jalannya pemerintahan yang mandiri, maka pemerintah daerah perlu mencari dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang ada di daerah. Sumber-sumber daya yang telah dikelola oleh Pemerintah Daerah menjadi salah satu sumber pendanaan bagi belanja daerah, belanja daerah disini lebih diarahkan pada Belanja modal daerah, karena Belanja modal daerah menjadi pendukung dari peningkatan sarana dan prasarana bagi pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi salah satu indikator bagi penilaian kinerja pemerintah dalam mengemban amanah dari rakyat.<sup>6</sup>**

Selanjutnya, faktor yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi adalah Indeks Pembangunan Manusia atau lebih dikenal dengan akronomi IPM. Ketika

menjalankan rumusan mengenai peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan menjadi salah satu indikator yang paling penting dalam proses mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan adalah proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik lagi yakni tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera khususnya bagi negara Indonesia.

Salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat adalah melalui IPM, indikator tersebut merupakan data strategis, karena IPM merupakan tolak ukur bagi kinerja pemerintah dan juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum. Seperti yang diungkapkan oleh Mohammad Bhakti Setiawan dan Abdul Akim menyatakan bahwa,

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.<sup>7</sup>**

Indeks pembangunan manusia dapat diukur dan dihitung berdasarkan empat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan,

---

<sup>6</sup>) Imoratus Sholikhah dan Agus Wahyudi, **Analisis Belanja modal daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa**, Accounting Analysis Journal, Universitas Negeri Semarang, Volume 3, Nomor 4, 2014, hal. 554.

<sup>7</sup>) Mohammad Bhakti Setiawan dan Abdul Hakim, **Indeks Pembangunan Manusia Indoensia**, Jurnal Economia, Universitas Islam Indonesia, Volume 9, Nomor 1, April 2013, hal. 20.

angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah yaitu mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan dan juga daya beli atau paritas daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan hidup layak.

Konsep dari indeks pembangunan manusia itu sendiri adalah konsep yang mengkehendaki peningkatan kualitas hidup penduduk suatu negara baik dari segi fisik, mental maupun itu dari segi spiritual. Bahkan secara eksplisit dikatakan bahwa indeks pembangunan manusia yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Harapan akan peningkatan kondisi perekonomian, terus menjadi sasaran utama dalam pembangunan berkelanjutan, meskipun hal tersebut belum tentu dapat berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang dapat mengukur pertumbuhan ekonomi mengalami kondisi yang dinamis dari masa ke masa.

**Tabel 1: Data Konsumsi Rumah Tangga, Angkatan Kerja, Belanja modal daerah Daerah, IPM dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara**

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga (rupiah)	Angkatan Kerja (jiwa)	Belanja modal daerah Daerah (rupiah)	IPM (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2014	398.932	6.272.083	8.526.300.000	68,87	5,23
2015	775.189	6.391.098	1.394.810.000	69,51	5,10
2016	853.756	6.363.909	1.243.297.180	70	5,18
2017	909.817	6.743.277	2.097.169.186	70,57	5,12
2018	2.003.418	7.124.458	1.900.431.185	71,18	5,18

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 (data diolah)

Jika memperhatikan data di atas dalam kurun waktu lima tahun terakhir, maka dapat diketahui untuk jumlah rata-rata konsumsi rumah tangga per bulan dalam satu tahun, pada tahun 2018 adalah nilai tertinggi, dengan rata-rata pengeluaran rumah tangga dalam sebulan yaitu Rp 2.003.418 dan rata-rata pengeluaran sebulan dengan nilai terendah berada pada tahun 2014, yaitu Rp 398.932.

Konsumsi tersebut merupakan rata-rata pengeluaran dalam sebulan, terbagi atas konsumsi atas produk makanan dan bukan makanan. Untuk konsumsi makanan jumlah dan besaran konsumsi adalah produk makanan sehari-hari, seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan dan daging, sayur dan buah, bumbu-bumbuan, minuman, rokok dan jenis makanan sehari-hari lainnya, sedangkan konsumsi bukan makanan adalah pengeluaran tambahan seperti, kebutuhan dan fasilitas rumah seperti internet, pakaian, pembayaran pajak, dan penggunaan atas jasa serta komoditas tahan lama lainnya.

Lonjakan tingkat konsumsi pada tahun 2018 disebabkan oleh pola konsumsi masyarakat yang bersifat konsumtif dan berorientasi pada kegiatan yang simpel dan mudah. Jenis pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran rata-rata rumah tangga atas konsumsi barang makanan dan non-makanan. Untuk konsumsi yang termasuk makanan adalah konsumsi yang biasa digunakan oleh rumah tangga, seperti padi-padian, umbi-umbian, sayur, minyak, buah-buahan rokok, bumbu dan lain sebagainya. Sedangkan konsumsi non-makanan adalah jumlah konsumsi atas produk penunjang rumah tangga, contohnya yaitu penggunaan komoditas jasa, perumahan dan fasilitas rumah tangga, pembayaran beban tagihan kepada negara seperti pajak, pembelian pakaian, dan lain sebagainya



Pada angkatan kerja jumlah angkatan kerja paling tinggi adalah pada tahun 2018 sebesar 7.124.458 jiwa dan angkatan kerja paling rendah berada pada tahun 2014 yaitu berjumlah 6.272.083 jiwa. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini di pengaruhi oleh peningkatan jumlah tenaga kerja yang signifikan pada tahun tersebut, meskipun pada tahun 2014 jumlah angkatan kerja adalah jumlah yang paling rendah, namun angkatan kerja mengalami pertumbuhan yang baik di tahun 2018.

Untuk belanja modal daerah, tercatat bahwa pada tahun 2014 adalah jumlah belanja modal daerah yang paling besar yaitu sebesar Rp 8.526.300.000 miliar per tahun dan nilai belanja modal daerah terendah berada pada tahun 2016 dengan nilai pengeluaran sebesar Rp 1.243.297.180 miliar per tahun. Belanja modal daerah cenderung mengalami penurunan, dapat dilihat bahwa hanya pada tahun 2014 yang memiliki nilai belanja daerah yang tinggi, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, belanja modal daerah terus mengalami penurunan signifikan.

Kemudian, terkait IPM, indeks tertinggi berada pada tahun 2018 dengan nilai capain IPM adalah sebesar 71,18 persen dan nilai IPM terendah berada pada tahun 2014 sebesar 68,87 persen. Selama lima tahun terakhir IPM mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meskipun pada tahun 2014 adalah nilai IPM yang paling rendah, namun pada 2015 sampai dengan tahun 2018 IPM mengalami peningkatan, hingga puncaknya peningkatan tersebut berlangsung pada tahun 2018 dengan peningkatan yang cukup signifikan dan baik

Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi, nilai yang paling tertinggi berada pada tahun 2014 dengan persentasi sebesar 5,23 persen dan pertumbuhan terendah

berada pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,10 persen. Perubahan yang signifikan ini juga terjadi terhadap pertumbuhan ekonomi, berdasarkan data, maka dapat diketahui bahwa selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami kondisi yang berfluktuasi. Di tahun 2014 merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemudian menurun seiring berjalannya waktu, hingga pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai posisi 5,18 persen.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu cermin yang menunjukkan kualitas dari perekonomian, semakin baik pertumbuhan ekonomi, dalam artian kondisi yang tersaji bahwa pertumbuhan ekonomi selalu meningkat. Namun, kondisi dari variabel penentu untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi mengalami gejolak dan memiliki laju fluktuatif dari tahun ke tahun, meskipun variabel-variabel tersebut telah menjadi salah satu tolak ukur dalam mengukur seberapa kuat kondisi perekonomian.

Para pemangku kepentingan berharap bahwa kondisi perekonomian selalu dalam kondisi prima dan kuat, namun fluktuasi yang tak terhindarkan memaksa semua pemangku kepentingan untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian, yang memiliki dampak secara menyeluruh bagi semua pihak dan masyarakat, terutama di Provinsi Sumatera Utara. Variabel-variabel ekonomi yang mengalami perubahan tersebut tentu akan mempengaruhi kinerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena dan hal-hal serta kondisi yang telah di paparkan sebelumnya, maka penulis merasa tertarik untuk menjadikan materi tersebut sebagai penelitian dalam skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh**

**Konsumsi Rumah Tangga, Angkatan Kerja, Belanja modal daerah Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara Tahun 2005-2019.”**

**1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh dari konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019 ?
2. Bagaimanakah pengaruh dari angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019 ?
3. Bagaimanakah pengaruh dari belanja modal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019 ?
4. Bagaimanakah pengaruh dari indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019 ?

**1.3. Tujuan Penelitian**

Bedasarkan rumusan masalah yang telah di tetapkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agar dapat diketahui pengaruh dari konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019.
2. Untuk dapat diketahui pengaruh dari angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019.
3. Agar dapat diketahui pengaruh dari belanja modal daerah terhadap

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019.

4. Mengetahui pengaruh dari indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.

2. Bagi perguruan tinggi

Untuk menambah jumlah penelitian ilmiah yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan kajian akademik dan mengaplikasikan Tri Dharma perguruan tinggi dalam bidang penelitian.

3. Bagi pemerintah (*stakeholder*)

Agar memiliki acuan yang lebih baik dalam menentukan keputusan yang terkait dengan judul penelitian.

4. Bagi kalangan umum

Mampu menambah referensi yang dapat memberikan informasi kemungkinan ada penelitian lebih lanjut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pertumbuhan Ekonomi

##### 2.1.1. Aspek Dasar Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menciptakan iklim/kondisi perekonomian yang lebih baik dengan melakukan sinergi antar *stakeholder* pemerintah dan pihak swasta sebagai penggerak perekonomian demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Malthus dalam Nur Rahmi Hamzah,

**Proses pembangunan adalah suatu proses naik-turunnya aktivitas ekonomi lebih dari pada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian bergantung pada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut.<sup>8</sup>**

Prinsip yang berkembang seiring dengan paradigma tersebut adalah pembangunan berkelanjutan. Pandangan tersebut merupakan salah satu hal yang penting untuk dapat dicapai dalam mencapai kondisi perekonomian yang efisien dan tepat guna, pembangunan ekonomi yang tepat adalah pembangunan ekonomi yang memberikan dampak berkelanjutan atau yang biasa dikenal sebagai *sustainable development*.

Jika berbicara mengenai pembangunan ekonomi, kondisi yang baik dari tolak ukur pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi juga harus mengalami kondisi yang baik. Seperti yang diungkap oleh Tafeta Febriyani dan Sri Kusreni,

---

<sup>8</sup>) Nur Rahmi Hamzah, **Pengaruh Faktor-Faktor Kependudukan Terhadap Pembangunan Ekonomi di Kota Makassar**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin 2017), hal. 22 (Skripsi Diterbitkan).

**Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktifitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode tertentu yang bisa menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.<sup>9</sup>**

Pembangunan manusia berarti adanya pertumbuhan ekonomi yang positif dan bertambahnya kesejahteraan. Pembangunan manusia diharapkan dapat memberikan stimulasi kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan apa yang bisa dilakukan sesuai dengan kemampuannya masing-masing untuk menikmati hidup, melakukan kegiatan produktif, atau ikut serta memajukan bangsa.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan *output* per kapita, dalam hal ini, terdapat dua sisi yang perlu di perhatikan, yaitu sisi *output* total (\*GDP/*Grss Domestic Product*) dan sisi jumlah penduduk. *Output* per kapita adalah nilai total di bagi jumlah penduduk. Jadi proses, kenaikan *output* per kapita.

### **2.1.2. Perkembangan Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi berkembang dari masa ke masa sesuai dengan kondisi yang terjadi, aspek dinamis dari perekonomian ini kemudian disesuaikan ke kondisi perekonomian yang terjadi. Namun, secara garis besar, pertumbuhan ekonomi di bagi atas tiga bagian besar, dengan uraian sebagai berikut,

**Pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok teori yaitu teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan neo-klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern.**

---

<sup>9</sup>) Tafeta Febriyani dan Sri Kusreni, **Determinan Pertumbuhan Ekonomi di 4 Negara ASEAN**, Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan (JIET), Volume 2, Nomor 1, Juni 2017, hal. 1

1. Menurut Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha didalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Artinya para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi.
2. Teori pertumbuhan Neo Klasik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini yang dikembangkan oleh Abramovitas dan Solow, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi.
3. Teori pertumbuhan ekonomi modern meliputi teori pertumbuhan Rostow dan Kunznet. Menurut Rostow pembangunan ekonomi adalah suatu transformasi dari suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern melalui lima tahapan, yaitu tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat tinggal landas, tahap tinggal landas, tahap menuju kedewasaan, dan masyarakat berkonsumsi tinggi<sup>10</sup>

Seiring berjalannya waktu, dari masa ke masa, perkembangan teori pertumbuhan ekonomi tersebut kemudian yang menjadi acuan tolak ukur dalam perumusan-perumusan kebijakan perekonomian serta sebagai bahan ajar utama dalam institusi pendidikan yang mengajarkan tentang konsep-konsep dasar perekonomian makro dan mikro.

## 2.2. Konsumsi Rumah Tangga

### 2.2.1. Pengertian Konsumsi

Konsumsi, diambil dari bahasa Belanda '*consumptie*', dan dalam bahasa Inggris '*consumption*', ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu jenis barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Sehingga untuk konsumsi rumah tangga secara sederhana dapat diartikan sebagai, jenis barang atau jasa yang digunakan

---

<sup>10</sup>) Hewi Susanti, Mohd. Nur Syechalad dan Abubakar Hamzah, **Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Aceh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Setelah Tsunami**, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Universitas Syiah Kuala Aceh, Volume 4, Nomor 1, Mei 2017, hal. 3.

dan dihabiskan dalam lingkup rumah tangga. Konsumsi rumah tangga merupakan komponen tunggal terbesar dari pengeluaran keseluruhan actual.

**Salah satu komponen penting untuk menilai perkembangan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk adalah pola pengeluaran konsumsi masyarakat. Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga terhadap barang-barang akhir dan jasa-jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan lainnya serta berbagai jenis pelayanan. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya merupakan barang-barang konsumsi. Apabila pengeluaran-pengeluarankonsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat negara yang bersangkutan.<sup>11</sup>**

Berdasarkan pendapat Baginda Parsulian dan rekannya, maka jelas diketahui bahwa nilai konsumsi masyarakat merupakan jumlah konsumsi agregat dari suatu Negara. Tetapi, besaran jumlah yang menentukan jumlah untuk ingin dibelanjakan oleh rumah tangga dalam membeli barang dan jasa untuk konsumsinya dan seberapa banyak yang ingin mereka tabung. Dengan meningkatnya pendapatan sisa setelah di potong pajak dan pengeluaran rutin lainnya (*diposable income*), rumah tangga mempunyai lebih banyak uang untuk dibelanjakan sebagai konsumsi pelengkap lainnya.

### **2.2.2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Konsumsi**

Besaran tingkat konsumsi dapat diukur dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Karena hal ini tergantung dari tingkat pendapatan yang didapatkan, apabila konsumsi semakin tinggi, maka secara tidak langsung tentu karena pendapatan

---

<sup>11</sup>) Baginda Parsaulian, Hasdi Aimon dan Ali Anis, **Analisis Konsumsi Masyarakat di Indonesia**, Jurnal Kajian Ekonomi, Volume I, Nomor 2, Januari 2013, hal. 2



yang didapatkan juga semakin tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh Firdayetti, bahwa konsumsi dipengaruhi oleh,

**Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga besar:**

**1. Faktor-faktor Ekonomi**

**Ada tiga faktor ekonomi yang menentukan tingkat konsumsi adalah:**

- a. **Pendapatan Rumah Tangga (Household Income)** Biasanya makin baik (tinggi) tingkat pendapatan, tingkat konsumsi makin tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi makin besar. Misalnya jika pendapatan ayah masih sangat rendah, biasanya beras yang dipilih untuk konsumsi juga beras kelas rendah/menengah.
  - b. **Kekayaan Rumah Tangga (Household Wealth),** Bagian ini termasuk kekayaan riil (misalnya rumah, tanah, dan mobil) dan finansial (deposito berjangka, saham, dan surat-surat berharga). Kekayaan-kekayaan tersebut dapat meningkatkan konsumsi, karena menambah pendapatan disposibel. Misalnya, bunga deposito yang diterima tiap bulan dan dividen yang diterima setiap tahun menambah pendapatan rumah tangga. Tetntunya hal ini akan meningkatkan pengeluaran konsumsi.
  - c. **Tingkat Bunga (Interest Rate)** Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi keinginan konsumsi, baik dilihat dari sisi keluarga yang memiliki kelebihan uang ataupun yang kekurangan uang. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka biaya ekonomi (opportunity cost) dari kegiatan konsumsi akan semakin mahal. Bagi mereka yang ingin mengonsumsi dengan berhutang dulu, misalnya dengan meminjam dari bank atau menggunakan fasilitas kartu kredit, biaya bunga semakin mahal, sehingga lebih baik menunda konsumsi. Melainkan bagi mereka yang memiliki kelebihan uang, tingkat bunga yang tinggi menyebabkan menyimpan uang di bank terasa lebih menguntungkan ketimbang dihabiskan untuk konsumsi.
- 2. Faktor-faktor Demografi (Kependudukan)**  
Yang tercakup dalam faktor-faktor kependudukan adalah jumlah dan komposisi penduduk.
- 3. Faktor-faktor Non-Ekonomi**  
Faktor yang sangat berpengaruh seperti sosial-budaya masyarakat. misalnya saja, berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat (tipe ideal). Misalnya, berubahnya kebiasaan belanja dari pasar tradisional ke pasar swalayan.<sup>12</sup>

Kondisi-kondisi tersebut, sedikit banyaknya telah menjadi salah satu faktor-faktor penting yang menentukan jumlah konsumsi yang di habiskan dalam satu

periode bagi setiap rumah tangga. Kondisi ini berlaku secara linier, apabila tingkat konsumsi semakin tinggi maka jumlah penggunaan atas barang dan jasa yang di peruntukan bagi rumah tangga juga akan semakin besar.

### **2.2.3. Hubungan Konsumsi dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Secara mendasar, tingkat pengeluaran rumah tangga dalam bentuk konsumsi di pengaruhi oleh nilai pendapatan, jika konsumsi meningkat maka pendapatan juga pasti akan meningkat. Menurut Sukirno, “penghitungan PDRB dengan cara pengeluaran membedakan barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian menjadi empat komponen, yaitu konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal sektor swasta (investasi) dan ekspor neto (ekspor-impor)”<sup>13</sup>

Nilai total konsumsi adalah tingkat pendapatan yang dikurangkan dengan pengeluaran seperti pajak dan pengeluaran lainnya (pendapatan disposable). Lebih jauh lagi Mankiw dalam Nurul Huda menjelaskan bahwa fungsi konsumsi sangat

---

<sup>12</sup> Firdayetti dan Michael Toni Ardianto, **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi di Indonesia menggunakan Error Correction Model (ECM) Periode Tahun 1994.1-2005.4**, Media Ekonomi, Volume 19, Nomor 1, April 2011, hal. 9-10.

<sup>13</sup>) Padli, Hailuddin, Wahyunadi, **Pengaruh Pengeluaran Rumah Tangga, Investasi Swasta dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2001-2017**, Jurnal Lentera, Volume 18, Nomor 2, 10 Agustus 2019, hal. 211

erat di pengaruhi oleh tingkat pendapatan yang secara agregat di gambarkan dengan pertumbuhan ekonomi,

**Konsumsi ditentukan oleh pendapatan disposibel, Dimana semakin tinggi tingkat pendapatan disposibel, semakin besar konsumsi dan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (*average propensity to consume*) turun ketika pendapatan naik. Untuk itu dapat dibuat suatu model persamaan yang menyatakan bahwa konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan disposibel. Dengan model persamaan sebagai berikut :**

$$C_t = f(Y_d_t)$$

**Persamaan di atas menyatakan bahwa konsumsi merupakan fungsi dari  $Y_d$ , Dimana  $Y_d$  didefinisikan sebagai pendapatan pada periode tertentu dan pada periode sebelumnya.<sup>14</sup>**

Berdasarkan ungkapan tersebut, maka dapat diketahui bahwa konsumsi merupakan tergantung terhadap tingkat pendapatan yang telah di potong pajak (*disposabel*) pada masa penghitungan tertentu dan periode penghitungan sebelumnya.

## **2.3. Angkatan Kerja**

### **2.3.1. Konsep Angkatan Kerja**

Uraian terhadap konsep ketenagakerjaan ini kemudian berbeda-beda antara satu dengan lainnya, dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak menggunakan istilah angkatan kerja, namun hanya ‘tenaga kerja’ saja, dan mengartikan “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>) Nurhuda N., Op. Cit., hal. 113.

<sup>15</sup>) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan angkatan kerja sebagai penduduk usia kerja yang sedang bekerja, sedang tidak bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) membagi konsep tersebut dalam dua bagian besar, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

1. **Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.**
2. **Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.<sup>16</sup>**

Lebih rinci kemudian di jelaskan oleh Payman J. Simajuntak dalam Rizki Herdian Zenda dan Suparno,

**Pengertian tenaga kerja pun sifatnya terbatas karena tidak semua penduduk merupakan tenaga kerja, hanya penduduk yang telah mencapai usia minimumlah yang baru bisa dianggap sebagai tenaga kerja. Sedangkan untuk usia 14 tahun keatas (remaja) yang mempunyai tertentu dalam suatu kegiatan ekonomi dan mereka yang tidak bekerja, sebenarnya mereka tidak dihitung sebagai angkatan kerja karena mereka yang masih bersekolah, juga wanitayang mengurus rumah tangga/keadaan fisik tidak bekerja/tidak mencari pekerjaan tidak dikatakan sebagai angkatan kerja.<sup>17</sup>**

Jika memperhatikan konsep-konsep tersebut maka, angkatan kerja dapat diartikan sebagai, jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang sedang giat dalam mencari pekerjaan, menunggu bekerja dan telah bekerja, produktif dalam bekerja menghasilkan barang dan jasa serta nilai tambah ekonomi lainnya, merupakan angkatan kerja.

---

<sup>16)</sup> Anonim, BPS, "Konsep Angkatan Kerja" di akses dari <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab1> pada tanggal 27 Agustus 2020

<sup>17)</sup> Rizki Herdian Zenda dan Suparno, **Peranan Sektor Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surabaya**, Jurnal Ekonomi & Bisnis, Universitas 14 Agustus 1945 Surabaya, Volume 2, Nomor 1, Maret 2017, hal. 373.

### 2.3.2. Hubungan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai salah satu faktor produksi, angkatan kerja merupakan salah satu hal yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apabila jumlah angkatan kerja dapat di berdayakan secara optimal maka akan mendukung pertumbuhan ekonomi, karena modal manusia yang digunakan memberikan nilai tambah positif bagi perekonomian.

“Ada empat faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal dan teknologi.”<sup>18</sup> Selanjutnya, lebih dalam lagi dapat diketahui bahwa tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

**Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik. Menurut teori pertumbuhan ekonomi klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi. Persamaannya adalah :**

$$Y = f(K, L, T)$$

**Y = tingkat pertumbuhan nasional.**

**K = tingkat penambahan barang modal. T = tingkat penambahan teknologi.**<sup>19</sup>

Secara sederhana dan mudah, Todaro menjelaskan bahwa,

**Pertumbuhan penduduk, dan akibatnya pada kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*), selama ini dipandang sebagai faktor positif untuk**

<sup>18</sup>) Eunike Elisabeth Bawuno, Josep Bintang Kalangi dan Jacline I. Sumual, **Pengaruh Investasi Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado (Studi pada Kota Manado Tahun 2003-2012)**, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Bolume 15, Nomor 4, 2015, hal. 246.

<sup>19</sup>) Kurnia Maharani dan Sri Isnowati, **Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Keterbukaan Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah**, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JEB), Volume 21, Nomor 1, Maret 2014, hal. 64.

**mendorong pertumbuhan ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti pekerja produktif yang lebih banyak.**<sup>20</sup>

#### **2.4. Belanja Modal Daerah**

Aplikasi dari konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal daerah, mengarahkan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan pengelolaan daerah, maka daerah yang memiliki hak tersebut berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam mengelola hak dan kewajiban daerah itu sendiri, secara mandiri dan terbuka. Sehingga kemudian, jumlah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk keperluan penambahan nilai asset daerah, diartikan sebagai belanja modal daerah.

Belanja modal daerah adalah pengeluaran anggaran untuk peroleha asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Belanja modal daerah meliputi antara lain belanja modal daerah untuk tanah, gedung dan bangunan, peralatan serta asset-aset tak berwujud lainnya yang menjadi kepemilikan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantuan.

Ini berimplikasi pada daerah-daerah untuk memiliki hak, kewenangan dan kewajiban otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Variabel ekonomi, belanja modal daerah adalah

---

<sup>20</sup>) Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, **Pembangunan Ekonomi**, Edisi Ke-11, Jilid 1, Alih Bahasa : Agus Dharma (Jakarta : Erlangga 2011), hal. 171.

pengeluaran dari rekening kas umum yang dapat mengurangi jumlah nilai kewajiban daerah yang tersalurkan ke suatu wilayah, untuk setiap wilayah yang telah memiliki hak, kewajiban dan kewenangan sendiri, disebutlah sebagai belanja modal daerah daerah. Lufki Laila Nurhidayati dan Rizal Yaya dalam tinjauan nya menjelaskan bahwa,

**Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengakibatkan berkurangnya nilai ekuitas dana sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran serta tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja juga dirinci menurut urusan Pemda, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.<sup>21</sup>**

Secara umum, diketahui bahwa penggunaan istilah ini sering ditemukan dalam publikasi nota keuangan yang diterbitkan oleh wilayah administrasi tingkat wilayah dua, provinsi, berupa APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan Kementerian Keuangan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional) dengan berbagai postur susunan keuangan neraca akuntansi dan menyesuaikan terhadap jenis-jenis serta pos pengeluaran daerah dan nasional.

**Dalam Anggaran Pemerintah Daerah, porsi alokasi belanja modal daerah dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi atas belanja modal daerah yang dilaksanakan pemerintah daerah akan memiliki multiplier effect untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh sebab itu, semakin tinggi angka rasio belanja modal daerah dalam struktur APBD, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>22</sup>**

---

<sup>21</sup>) Lufki Laila Nurhidayati dan Rizal Yaya, **Alokasi Belanja Modal Daerah Untuk Pelayanan Publik : Praktik di Pemerintah Daerah**, JAAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Volume 17, Nomor 2, Desember 2013, hal. 104.

<sup>22</sup>) Sugiyanta, **Analisis Belanja Modal Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia**, Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Volume 14, Nomor 1, Juni 2016, hal. 20.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perenan belanja modal daerah dalam proses dan persentasi peningkatan pembangunan daerah sangatlah penting dan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan di daerah yang berkelanjutan.

#### **2.4.1. Hubungan Belanja Modal Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Belanja modal daerah dapat dikategorikan sebagai pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) daerah untuk keperluan sesuai dengan penempatan dan sasaran penggunaan belanja modal itu sendiri. Karena merupakan salah satu pengeluaran, maka harapannya adalah penggunaan yang tepat akan meningkatkan permintaan atas barang-jasa daerah.

“Peningkatan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan semakin meningkatkan pendapatan daerah, karena peningkatan *aggregat demand* akan mendorong kenaikan investasi dan pada akhirnya menyebabkan kenaikan produksi”.<sup>23</sup> Sehingga jelas diketahui bahwa belanja modal merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

**Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional.**

---

<sup>23</sup>) Hendri Panggayuh, **Pengaruh Belanja Modal dan Investasi terhadap Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**, Jurnal Eko-Regional, Volume 11, Nomor 1, Maret 2016, hal. 28.



Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa belanja modal sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Sumber-sumber penerimaan daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004) yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan belanja daerah berasal dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk asset tetap berwujud yang memberikan manfaat lebih dari satu periode.<sup>24</sup>**

## 2.5. Indeks Pembangunan Manusia

### 2.5.1. Konsep dan Teori Dasar Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan didefinisikan sebagai suatu kegiatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek kehidupan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan social, salah satu alat ukur yang digunakan adalah IPM atau Indeks Pembangunan Manusia.

Seorang ahli Ekonomi Pembangunan, Mudrajat Kuncoro menyebutkan bahwa,

**Pada dasarnya, ada dua macam indikator yaitu indikator ekonomi yang meliputi *Gross National Product (GNP)* per kapita dengan laju pertumbuhan ekonomi, *Gross Domestic Product (GDP)* per kapita dengan *purchasing power parity (PPP)* dan indikator non-ekonomi terdiri atas *Human Development Index (HDI)* dan *physical quality life index (PQLI)*.<sup>25</sup>**

Indeks pembangunan manusia secara sederhana dapat diartikan sebagai pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan

---

<sup>24</sup>) Ahmad Fajri, **Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Sumatera**, e-Jurnal Perseptif dan Pembangunan Daerah Universitas Jambi, Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2016, hal. 31.

<sup>25</sup>) Subandi, **Ekonomi Pembangunan**, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung 2011, hal. 32

standar hidup layak untuk semua negara di seluruh dunia. Indeks pembangunan manusia atau IPM digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah negara tergolong negara yang maju ataupun tergolong sebagai negara yang berkembang maupun negara yang terbelakang dan tentunya IPM dilakukan untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup masyarakat.

Hal ini sependapat dengan Maulana dan Bowo dalam Zulfikar Mohamad Yamin Latuconsina menyatakan bahwa, “keberhasilan pembangunan suatu wilayah diukur dengan beberapa parameter, dan paling populer saat ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks (HDI)*”<sup>26</sup>

Pengukuran kesejahteraan menggunakan IPM ini dipopulerkan oleh UNDP yaitu akronim dari *United National Development Programm* pada tahun 1996 dalam publikasi mereka, yang kemudian “dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*”<sup>27</sup>, pada masa kini telah digunakan oleh sebagian besar negara di dunia, definisi mengenai pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Untuk menjamin tercapainya pembangunan manusia UNDP merumuskan beberapa hal yang patut dipertimbangkan dalam mengukur dimensi pembangunan manusia sebagai berikut :

- 1. Pemberdayaan yang dipengaruhi oleh kapabilitas, setiap orang bebas untuk melakukan sesuatu tetapi jika tidak memiliki kapabilitas maka tidak akan menikmati kebebasan tersebut,**

---

<sup>26)</sup> Zulfikar Mohamad Yamin Latuconsina, **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel**, *Jurnal of Regional and Rural Development Planning*, Volume 1, Nomor 2, Juni 2017, hal. 204.

<sup>27)</sup> Anonim, Indeks Pembangunan Manusia, <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html> di akses pada tanggal 28 November 2019.

dengan bekerja sama maka akan tercipta perluasan pilihan seseorang, dengan demikian pembangunan manusia tidak hanya fokus pada individual tetapi pada bagaimana kehidupannya sosialnya.

2. Kesetaraan yang bermakna kesamaan peluang atau kesempatan.
3. Keberlanjutan yang bermakna kesamaan peluang atau kesempatan antar generasi.
4. Keamanan dari berbagai aspek tidak hanya aman dari bencana tetapi dari ancaman lainnya.<sup>28</sup>

Kemampuan yang mengukur IPM ini kemudian akan menjelaskan bagaimana tingkat keberhasilannya pada masyarakat luas.

### 2.5.2. Dimensi Dasar dan Perbandingan Pengukuran IPM

Pembangunan manusia memiliki makna yang luas mencakup kehidupan sosial manusia. Aspek tersebut akan mempengaruhi kemampuan perekonomian agregat secara menyeluruh, maka disimpulkan bahwa IPM sangat penting perannya bagi perekonomian makro, hal ini serupa seperti yang di ungkapkan dalam website UNDP,

*Human development focuses on improving live people lead rather than assuming that economic growth will lead, automatically, to greater wellbeing for all. Income growth is seen as a means to development, rather than an end in itself.*<sup>29</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas maka diketahui bagaimana penting nya IPM dalam membangun kondisi perekonomian. Cara yang dapat dilakukan dalam mengukur tingkat keberhasilan IPM adalah dengan membuat rangking nilai IPM berdasarkan capaian kemampuan setiap wilayah. BPS mengelompokkan status pembangunan manusia menjadi 4 kelompok dengan kriteria sebagai berikut ini,

<sup>28)</sup> Buku Publikasi BPS, Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017, hal. 9-10.

<sup>29)</sup> Anonim, UNDP, di akses dari <http://hdr.undp.org/en/humandev> pada tanggal 26 November 2019

**Tabel 2 : Klasifikasi Penilaian IPM**

<b>Kelompok</b>	<b>Penilaian</b>
Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Rendah	$IPM < 60$

**Sumber : Katalog BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2017 (data diolah)<sup>30</sup>**

Indikator yang dapat dilihat dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia adalah pendapatan perkapita, pendidikan atau pengetahuan dan juga dalam bidang kesehatan. Faktor tersebut adalah indikator pengukuran yang digunakan untuk melihat bagaimana keberhasilan IPM dalam pembangunan. Seiring dengan perkembangan zaman, pengukuran akan pembangunan manusia kemudian di kembangkan oleh beberapa lembaga lainnya, hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa IPM menurut UNDP belum tentu dapat digunakan oleh seluruh wilayah di bagian dunia.

Terkait hal ini maka disusunlah beberapa indikator pengukuran keberhasilan penduduk menurut lembaga yang mengukur progresifitas kependudukan. Pada Indonesia lembaga-lembaga tersebut adalah BPS yang telah cakap dalam mengumpulkan data kependudukan melalui sensus, dan ada juga LIPI (Lembaga Penelitian Indonesia) yang telah sering melakukan penelitian terkait demografi.

Agar diketahui bagaimana IPM dapat berguna bagi seluruh aspek pengukuran, maka penting memilih pendekatan yang paling sesuai dalam mengukur indeks tersebut. Selain UNDP dan BPS, Lipi juga telah menguraikan

<sup>30)</sup> Buku Publikasi BPS Tahun 2017, Op. Cit., , hal. 19.

indikator dasar dalam mengukur Indeks Pembangunan Indonesia, BPS dan LIPI sebagai lembaga pemerintah terus memperbaharui bagaimana IPM dapat berguna dalam mengukur pembangunan manusia di Indonesia, metode tersebut tersaji pada tabel sebagai berikut ini,

Tabel 3 : Pengukuran IPM berdasarkan pada Indikator UNDP, BPS dan LIPI.

UNDP	BPS	LIPI
Life Expectancy at Birth 2/3 (literacy rate +1/3 (mar years of schooling)) Real GDP perkapita Skala pengukuran 0-1	Life Expectancy at Birth 2/3 (literacy rate) + 1/3 (mar years of schooling) Pengeluaran perkapita yang diukur dengan menggunakan purchasing power parity. Skala pengukuran : 0-100	A. Indikator Utama Umur Harapan Hidup Tingkat melek huruf (persentase penduduk dengan pendidikan SD ke atas) Pendapatan per Kapita (PDRB/Kapita) Indikator pendukung (input dan proses) Cakupan Imunisasi Ratio penduduk\ dokter Ratio penduduk\ paramedis Ratio penduduk\ puskesmas Akses terhadap air bersih Akses terhadap sanitasi Angka enrolmen SD Angka enrolmen SLTP Angka enrolmen SLTA Ratio guru\murid SD Ratio guru\murid SLTP Ratio guru\murid SLTA Proporsi penduduk kota Proporsipenduduk pertanian Proporsi rumah tangga pemakai listrik Ratio penduduk\ panjang jalan aspal Skala pengukuran :1-10 yang dikalikan 10

Sumber : Azril Azahari (2000)<sup>31</sup>

<sup>31</sup>) Azril Azahari, **Pembangunan Sumber Daya Manusiadan Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pertanian**, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Volume 15, Nomor 1, (Universitas Tri Sakti : 2000), hal. 61.

Setelah memperhatikan tabel perbandingan di atas, maka jelas diketahui bahwa skala dalam pengukuran IPM yang paling mendasar adalah dengan memperhatikan fertilitas dan mortalitas serta angka harapan hidup penduduk, kecakapan pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta tingkat pendapatan.

### **2.5.3. Hubungan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah tolak ukur dari kemampuan faktor-faktor produksi yang memberikan kontribusi maksimal kepada perekonomian secara menyeluruh, peningkatan tersebut harus di dorong dari kapasitas modal manusia yang baik dan unggul, sehingga modal manusia merupakan salah satu hal yang penting dalam menunjang perekonomian.

Apabila seluruh modal manusia bekerja maka tingkat sumbangan pertumbuhan ekonomi juga akan semakin baik. Jumlah tenaga kerja tersebut kemudian akan meningkatkan pendapatan per kapita, secara langsung juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

**Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat.<sup>32</sup>**

Kemudian, optimalisasi dari modal manusia tersebut akan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang di ukur melalui Indek Pembangunan Manusia yang terdiri dari kesehatan, pendidikan dan angkat harapan hidup serta tingkat melek

<sup>32</sup>) Nyoman Lilya Santika Dewi dan I Ketut Sutrisna, **Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali**, E-Jurnal EP Unud, Volume 3, Nomor 3, Maret 2014, hal. 110.

huruf, secara berkelanjutan hal ini akan memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

**Pertumbuhan ekonomi meningkatkan persediaan sumberdaya yang dibutuhkan pembangunan manusia. Peningkatan sumberdaya bersama dengan alokasi sumberdaya yang tepat serta distribusi peluang yang semakin luas, khususnya kesempatan kerja akan mendorong pembangunan manusia lebih baik. Hal ini berlaku juga sebaliknya, pembangunan manusia mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.<sup>33</sup>**

## 2.6. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka berisi tentang berbagai konsep dan teori terkait variabel penelitian dan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dengan keterkaitan antara variabel bebas dalam penelitian yaitu, Konsumsi Rumah Tangga, Angkatan Kerja, Belanja modal daerah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian terdahulu ini merupakan pendukung dalam penelitian dan sebagai bahan untuk memperkuat hasil analisis, antara lain :

1. Santi Nurmainah, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Pada jurnal penelitian dengan judul, **“Analisis Pengaruh Belanja modal daerah Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah).”** Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Belanja modal daerah pemerintah daerah berpengaruh

<sup>33</sup>) Eka Pratiwi Lumbantoruan dan Paidi Hidayat, **Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi di Indonesia (Metode Kointegrasi)**, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 2, Nomor 2, hal. 15.

signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. 2) Tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. 3) Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. 4) Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. 5) Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

2. Padli Hailuddin Wahyunadi, Universitas Mataram. Pada jurnal penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Swasta dan Belanja Langsung, Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2001- 2017.”** Dengan hasil penelitian sebagai berikut, 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga tidak berpengaruh signifikan namun berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien regresi konsumsi rumah tangga adalah 0.008278 dengan nilai t-hitung sebesar 0.338767 yang berarti bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2) Investasi swasta berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.0308 dengan nilai t-hitung sebesar 1.5534 yang berarti variabel investasi swasta berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap



pertumbuhan ekonomi. 3) Pengeluaran langsung pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.0525 dengan nilai t-hitung sebesar 2.5021 yang berarti bahwa pengeluaran langsung pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

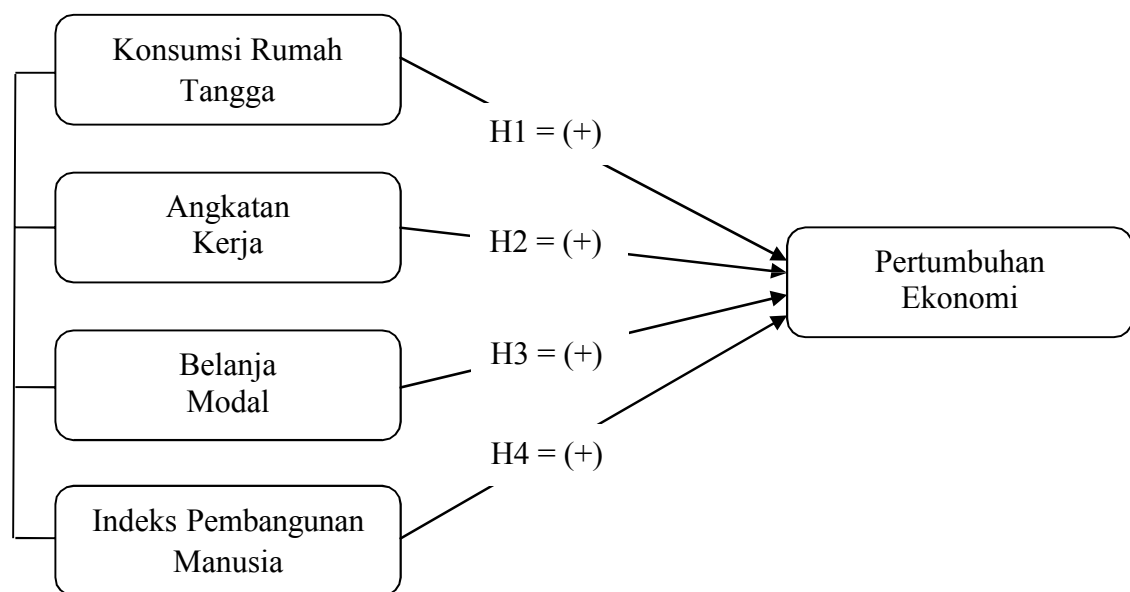
3. Muhammad Rafiq, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Pada penelitian skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2001:TI-2010:T4.”** Menghasilkan kesimpulan, 1) Konsumsi Rumah Tangga (C) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDB di Indonesia. 2) PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDB di Indonesia.
- 3) PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDB di Indonesia. 4) Pengeluaran pemerintah positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDB di Indonesia. 5) Konsumsi Rumah Tangga, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) dan pengeluaran pemerintah secara bersama sama berpengaruh positif dan signifikan pertumbuhan PDB di Indonesia.

## **2.7. Kerangka Berpikir**

Variabel yang digunakan dalam kerangka penelitian ini adalah, Konsumsi Rumah Tangga, Angkatan Kerja, Belanja modal daerah dan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel bebas atau variabel X sedangkan Pertumbuhan Ekonomi digunakan sebagai variabel terikat atau variabel Y. Konsumsi Rumah Tangga

adalah jumlah rata-rata konsumsi dalam sebulan yang dimiliki seluruh warga Indonesia, Angkatan Kerja adalah jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara, Belanja modal daerah adalah jumlah belanja yang dikeluarkan pemerintah Sumatera Utara dan tertera dalam APBD, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia adalah persentasi tingkat pembangunan manusia di Sumatera Utara. Untuk Pertumbuhan Ekonomi adalah ukuran dasar yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan rakyat dan indikator pengukuran peningkatan kondisi perekonomian.

Kelima variabel tersebut merupakan variabel dalam penelitian ini yang kemudian untuk diregresikan agar mendapatkan pengaruh dan tingkat signifikan. Berdasarkan hasil regresi atas data pada variabel variabel tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah dan pihak yang terkait mengenai peningkatan dan korelasi antar variabel.



**Gambar 1 : Kerangka Berpikir dalam Penelitian**

## **2.8. Hipotesis**

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dirumuskan dalam menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh positif dan nyata (signifikan) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara pada tahun 2005-2019.
2. Angkatan Kerja berpengaruh positif dan nyata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara pada tahun 2005-2019.
3. Belanja modal daerah berpengaruh positif dan nyata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara pada tahun 2005-2019.
4. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan nyata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara pada tahun 2005-2019.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup penelitian ini dilakukan di Sumatera Utara dengan menganalisis pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Angkatan Kerja, Belanja modal daerah, Indeks Pembangunan Manusia, terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.

#### **3.2. Jenis Dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari BPS . Data yang dibutuhkan antara lain:

1. Data Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara tahun 2005-2019.
2. Data Konsumsi Rumah Tangga di Sumatera Utara tahun 2005-2019.
3. Data Angkatan Kerja di Sumatera Utara tahun 2005-2019.
4. Data Belanja modal daerah di Sumatera Utara tahun 2005-2019.
5. Data Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara tahun 2005-2019.

#### **3.3. Model Analisis**

##### **3.3.1. Metode Ekonometrik**

Metode yang digunakan untuk menganalisis analisis pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Angkatan Kerja, Belanja modal daerah dan Indeks Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara pada periode 2005-2019, adalah metode analisis korelasi kuantitatif. Analisis korelasi kuantitatif adalah teknik analisis yang akan menjelaskan hubungan variabel-variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan model regresi linear berganda yang di olah menggunakan *Software IBM SPSS Versi 24*.

### 3.3.2. Pendugaan Model

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis statistik berupa regresi linear berganda. Model persamaan regresi linear berganda tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + \epsilon_i$$

Dimana:  $i = 1, 2, 3, \dots, n$

Y	= Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara (persen/tahun)
$\alpha$	= Intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi (nilai statistik)
$X_1$	= Konsumsi Rumah Tangga(ribu rupiah/tahun)
$X_2$	= Angkatan Kerja (jiwa/tahun)
$X_3$	= Belanja modal daerah(miliar rupiah/tahun)
$X_4$	= Indek Pembangunan Manusia (persen/tahun)
$\epsilon_i$	= Galat (error term)

#### 3.3.2.1. Uji Secara Individu (Uji-t)

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas (Konsumsi Rumah Tangga, Angkatan Kerja, Belanja modal daerah dan Indeks Pembangunan Manusia) secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (Pertumbuhan Ekonomi), maka dilakukan pengujian dengan uji-t dengan taraf nyata  $\alpha = 5\%$

##### a) Konsumsi Rumah Tangga ( $X_1$ )

$H_0: \beta_1 = 0$  Artinya, Konsumsi Rumah Tangga tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

$H_1: \beta_1 > 0$  Artinya, Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

**b) Angkatan Kerja (X2)**

$H_0: \beta_2 = 0$  Artinya, Angkatan Kerja tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

$H_1: \beta_2 > 0$  Artinya, Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

**c) Belanja modal daerah (X3)**

$H_0: \beta_3 = 0$  Artinya, Belanja modal daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

$H_1: \beta_3 > 0$  Artinya, Belanja modal daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

**d) Indek Pembangunan Manusia (X4)**

$H_0: \beta_4 = 0$  Artinya, Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

$H_1: \beta_4 < 0$  Artinya, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Koefisien regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *probability* dengan taraf signifikannya. Apabila nilai Prob. < maka koefisien variabel tersebut signifikan mempengaruhi variabel terikat dan sebaliknya. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat keyakinan 95% atau = 5% dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika nilai *probability* t-statistik < 0,05% maka  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima

2. Jika nilai *probability t*-statistik  $> 0,05\%$  maka  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak

### 3.3.2.2. Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji F (Uji simultan) digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji F disebut juga uji kelayakan model yang digunakan untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak disini berarti bahwa model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun cara-cara untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut :

1.  $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 = 0$  berarti variabel bebas secara serempak/keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.  
 $H_1 : \beta_i$  tidak semua nol,  $i = 1, 2, 3, 4$  berarti variabel bebas secara serempak/keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
2. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5%.

Dasar pengambilan keputusan :

- a. Jika probabilitas (signifikan)  $< 0,05$  atau  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima.
- b. Jika probabilitas (signifikan)  $> 0,05$  atau  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak.

### 3.3.2.3. Uji Keباikan Suai : Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh

kemampuan model menjelaskan apakah model yang disajikan sudah baik untuk menjelaskan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa besar keragaman variabel terikat dapat dijelaskan oleh keragaman variabel bebas. Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran “kebaikan suai” (*goodness of fit*) dari persamaan regresi yang menyatakan seberapa baik pengaruh antara variabel X yang mempengaruhi Y. Dengan kata lain koefisien determinasi adalah suatu ukuran yang mengukur kebaikan suatu model persamaan regresi, apakah model persamaan regresi tersebut sudah baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel terikat dan variabel bebas.

Nilai  $R^2$  yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas atau kecil. Nilai  $R^2$  yang besar mendekati 1, berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

### **3.3.3. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik**

#### **3.3.3.1. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat (korelasi yang kuat) di antara variabel bebas. Variabel – variabel bebas yang mempunyai hubungan tidak mungkin dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel terikat. Pengaruhnya terhadap nilai taksiran :

- a. Nilai- nilai koefisien mencerminkan nilai yang benar.
- b. Karena galat bakunya besar maka kesimpulan tidak dapat diambil melalui uji-t.



- c. Uji-t tidak dapat dipakai untuk menguji keseluruhan hasil taksiran
- d. Tanda yang dihadapkan pada hasil taksiran koefisienakan bertentangan dengan teori.

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinearitas adalah dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*), bila nilai VIF  $<10$  maka dianggap tidak ada pelanggaran multikolinearitas, namun bila sebaiknya VIF  $>10$  maka dianggap ada pelanggaran multikolinearitas. Untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa parah kolinearitas (korelasi) antar sesama variabel bebas maka dapat dilihat dari matriks korelasi.

Bila nilai hasil uji  $> 0,95$  maka kolinearitasnya serius (tidak dapat ditolerir). Namun bila sebaliknya nilai hasil uji  $< 0,95$  maka kolinearitas dari sesama variabel bebas masih dapat ditolerir. Cara lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan cara regresi parsial. Cara ini diperoleh dibandingkan dengan nilai  $R^2$  pada regresi model utama. Jika  $R^2$  lebih besar daripada nilai  $R^2$  pada model utama maka terdapat multikolinearitas.

### 3.3.3.2. Autokorelasi

- a. Uji Durbin-Watson

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan serial autokorelasi, yaitu dengan uji Durbin Watson (uji D-W). Uji Durbin-Watson dilakukan dengan

membandingkan DW hitung dengan DW tabel. Jika terdapat autokorelasi maka ragam galat tidak lagi minim sehingga penduga parameter tidak lagi efisien.

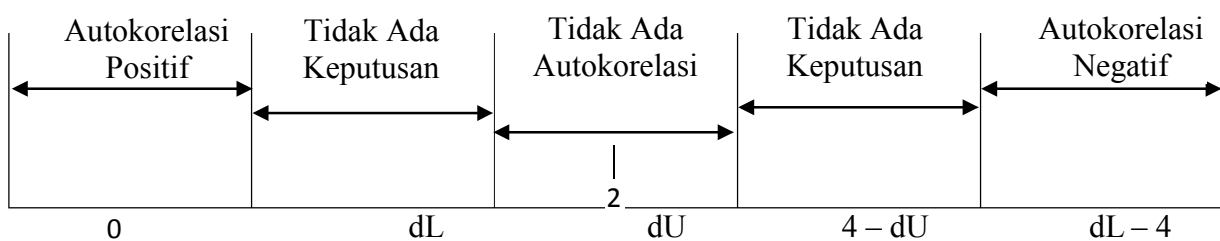
Uji Durbin-Watson dirumuskan sebagai berikut:

$$dW = \frac{\sum_{t=2}^n (\hat{e}_t - \hat{e}_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n \hat{e}_t^2}$$

Dengan jumlah sampel dan jumlah variabel tidak bebas tertentu diperoleh dari nilai kritis  $d_l$  dan  $d_u$  dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai  $\alpha$ .

Secara umum bisa diambil patokan :

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	Nodesicion	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	Nodesicion	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$



**Gambar 2 :Daerah Penyimpulan Keputusan Durbin – Watson**

Pada pelaksanaan uji autokorelasi, apabila nilai Durbin-Watson hitung jatuh pada bagian tidak ada keputusan, maka pengujian dapat dilanjutkan menggunakan variasi jenis lain dari uji autokorelasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan tepat dalam pengujian autokorelasi.

#### b. Uji Runs

Uji runs digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam

model yang digunakan. Uji runs merupakan bagian dari statistika nonparametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar galat terdapat korelasi yang tinggi jika antar galat (residu atau kesalahan pengganggu) tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa galat adalah acak atau random. Uji run digunakan untuk melihat apakah data galat terjadi secara acak atau tidak sistematis. Cara yang digunakan dalam uji run adalah sebagai berikut:

$H_0$  : Galat (res\_1) acak (random)  $H_1$  : Galat (res\_1) tidak acak.

### 3.3.3.3. Normalitas

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan simetris tidaknya distribusi data. Uji normalitas akan dideteksi melalui analisa grafis yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan SPSS. Uji normalitas menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel bebas dan variabel terikat, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji non-parameter, yaitu *Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit*, digunakan untuk mengetahui apakah distribusi nilai dalam sampel sesuai dengan distribusi teoritis tertentu, sehingga dikatakan bahwa data menyebar normal (normalitas data). Normalitas dapat diketahui dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* pada *alpha* sebesar 5% Jika nilai signifikansi dari pengujian *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 5% (0,05) berarti data normal.

Metode pengujian normalitas juga dapat menggunakan pendekatan diagram grafik Normal Probabilty Plot dan diagram histogram. Untuk penggunaan diagram

histogram residual menyerupai grafis distribusi normal maka bisa dikatakan bahwa residual mempunyai distribusi normal. Bentuk grafik distribusi normal ini menyerupai lonceng seperti distribusi t sebelumnya dimana jika grafik distribusi normal tersebut dibagi dua akan mempunyai bagian yang sama besarnya. Kemudian, normal probability plot dengan melihat sebaran data yang mendekati garis dugaan regresi, apabila sebaran data semakin dekat dengan garis dugaan regresi, maka data dapat dikatakan normal, dan jika semakin menjauh maka data dikatakan tidak normal.

### **3.4 Definisi Variabel Operasional**

#### **1. Pertumbuhan Ekonomi (Y)**

Pertumbuhan ekonomi adalah persentasi perubahan nilai angka PDRB Harga konstan yang ada di Sumatera Utara periode tahun 2005-2019 dan dinyatakan dalam satuan persen/tahun.

#### **2. Konsumsi Rumah Tangga (X1)**

Konsumsi Rumah Tangga adalah nilai tambahan bruto barang dan jasa – jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan sektor ekonomi atau lapangan usaha di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019 dan dinyatakan dalam satuan ribu rupiah/tahun.

### **3. Angkatan Kerja (X2)**

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang sedang bekerja maupun belum bekerja yang ada di Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2005-2019 dan dinyatakan dalam satuan orang/tahun.

### **4. Belanja modal daerah (X3)**

Belanja modal daerah adalah penerimaan keseluruhan jumlah keseluruhan Belanja modal daerah di Sumatera Utara pada periode tahun 2005-2019 dan dinyatakan dalam satuan miliar rupiah/tahun.

### **5. Indeks Pembangunan Manusia (X4)**

Indeks Pembangunan Manusia adalah rasio pengukuran tingkat kesejahteraan rakyat di Sumatera Utara di periode tahun 2005-2019 dan dinyatakan dalam persen/tahun.